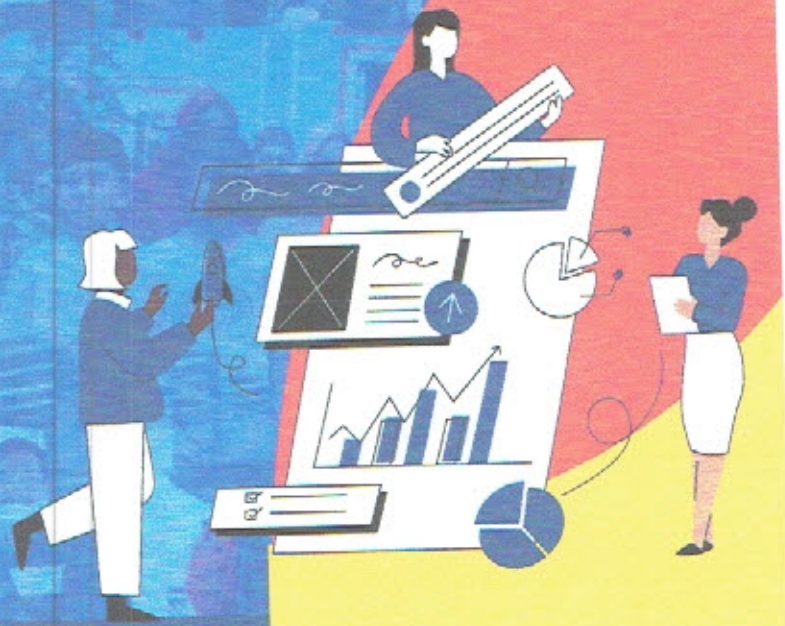
#DINSOS Hadir

RENCANA STRATEGIS

2023 - 2026

DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU



Jl. Dt. Setia Maharaja No.6
dinsoskampku@gmail.com
(0761) - 22602

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, alhamdulillahirrobbil alamin kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026. Renstra ini disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026. Renstra ini merupakan suatu keharusan bagi OPD untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan serta harus mampu menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar yaitu :

1. Apa yang hendak dicapai oleh OPD dalam 4 (lima) tahun kedepan ?
2. Bagaimana cara mencapainya ?
3. Langkah-langkah strategi apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan ?

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renstra ini memberikan dampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kota Pekanbaru, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026 ini.

PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN RENSTRA
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial 9

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial 20

2.2.1 Jumlah Pegawai 20

2.2.1.1 Berdasarkan Esselon 20

2.2.1.2 Berdasarkan Golongan/Ruang 20

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan 21

2.2.2 Aset Dinas Sosial 22

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial 42

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial 47

2.4.1 Lingkungan Internal 47

2.4.2 Lingkungan Eksternal 48

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial 51

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 54

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 61

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis 63

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN 66

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 69

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 71

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 80

BAB VIII PENUTUP 81

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1. Berdasarkan Eselon 20
Tabel 2.2. Berdasarkan Golongan/Ruang..... 20
Tabel 2.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 21
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022 42
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018 - 2022 43
Tabel 2.6. Capaian SPM Dinas Sosial Kota Pekanbaru 46
Tabel 2.7. Analisis Strategi dengan Faktor SWOT 50
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 52
Tabel 3.2. Data PMKS Tahun 2017 s/d 2019 54
Tabel 3.3. Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020 - 2024..... 60
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 68
Tabel 4.2. FormulaTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 69
Tabel T-C26.a Tujuan dan Sasaran Strategi Kebijakan RPD Kota Pekanbaru..... 68
Tabel T-C26.b Tujuan dan Sasaran Strategi Dinas Sosial Kota Pekanbaru..... 68
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2023-2026 75
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjadi tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 79
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 ... 79

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang terangkum dalam program Nawa Cita Presiden Joko Widodo yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program **"Indonesia Pintar"**, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program **"Indonesia Kerja"** dan **"Indonesia Sejahtera"** dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial , juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan dan kegiatan-kegiatan program.

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan manusia tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal ini

akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat, maka perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman, yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No 08 tahun 2012 saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Seperti yang kita ketahui bahwa Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 80 I HUK I 2010 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dengan sumber daya lain akan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan regional. Unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2023 - 2026.

Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini merupakan satu dokumen Perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan khususnya, Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan. Renstra ini dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua Stake Holder. Renstra sebagai dokumen

perencanaan jangka menengah untuk dituangkan ke dalam Rencana Tahunan, Renja , RKA dan APBD.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor sosial dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kota Pekanbaru sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok OPD - OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rencana strategis Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor sosial selama kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan 2023 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1954 tentang Undian;
3. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-Undang RI No. 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/ Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan (Printis kemerdekaan);
5. Undang-Undang RI No. 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
6. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
7. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;

8. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
10. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
11. Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
12. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
13. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
14. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
15. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
16. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
17. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
18. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
19. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
20. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
21. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
22. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
23. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban;
24. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Trafficking;
25. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
27. Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

28. Undang-undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Fakir Miskin;
29. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
31. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
32. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin;
33. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
34. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
35. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang persyaratan pengangkatan anak;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
40. Instruksi Presiden No. 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber Dana Yayasan;
41. Keppres RI No. 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi dan Pengembangan Generasi Muda;
42. Keppres RI No. 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
43. Keppres RI No. 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;

44. Keppres RI No. 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Pengendalian dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
45. Keppres RI No. 11 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
46. Keppres RI No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
47. Keppres RI No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
48. Keppres RI No. 34 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
49. Keppres RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan *(Trafiking)* Perempuan dan Anak;
50. Keppres RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
51. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi Gelandangan didalam Panti Sosial;
52. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 45 Tahun 1997 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
53. Keputusan menteri Sosial RI Nomor 70/HUK/1997 tentang Penanggulangan HIV/AIDS bidang Sosial;
54. Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 110 / HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

57. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
58. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
59. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
60. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial;
61. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005-2025;
62. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
63. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2023 - 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, program dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun kedepan serta Rencana Kerja.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja;
2. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.5 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

2.6 Sumber Daya Dinas Sosial

2.7 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

3.6 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.8 Penentuan isu-isu trategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII P E N U T U P

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas- dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota di bidang Kesejahteraan Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai berikut :

1. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
2. Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
3. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan sosial.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada kelayan yang telah dilatih dan diberi bantuan.
6. Pengelolaan dan Pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
7. Pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.

9. Pengelolaan Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengurus Karang Taruna dan lembaga sosial Masyarakat di kelurahan/desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial ada 26 PMKS yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana Karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan

hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat

setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 jenis, definisi dan kriteria Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada 12 yaitu sebagai berikut:

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan social.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab

sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan social.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
10. Penyuluh Sosial:
    a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
    b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota, maka layanan dasar SPM Sosial adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar diluar Panti Sosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani PMKS dan PSKS yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya.

   menyelenggarakan fungsi :

   a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial.

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
c. pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang sosial.
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya.
f. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

menyelenggarakan fungsi :

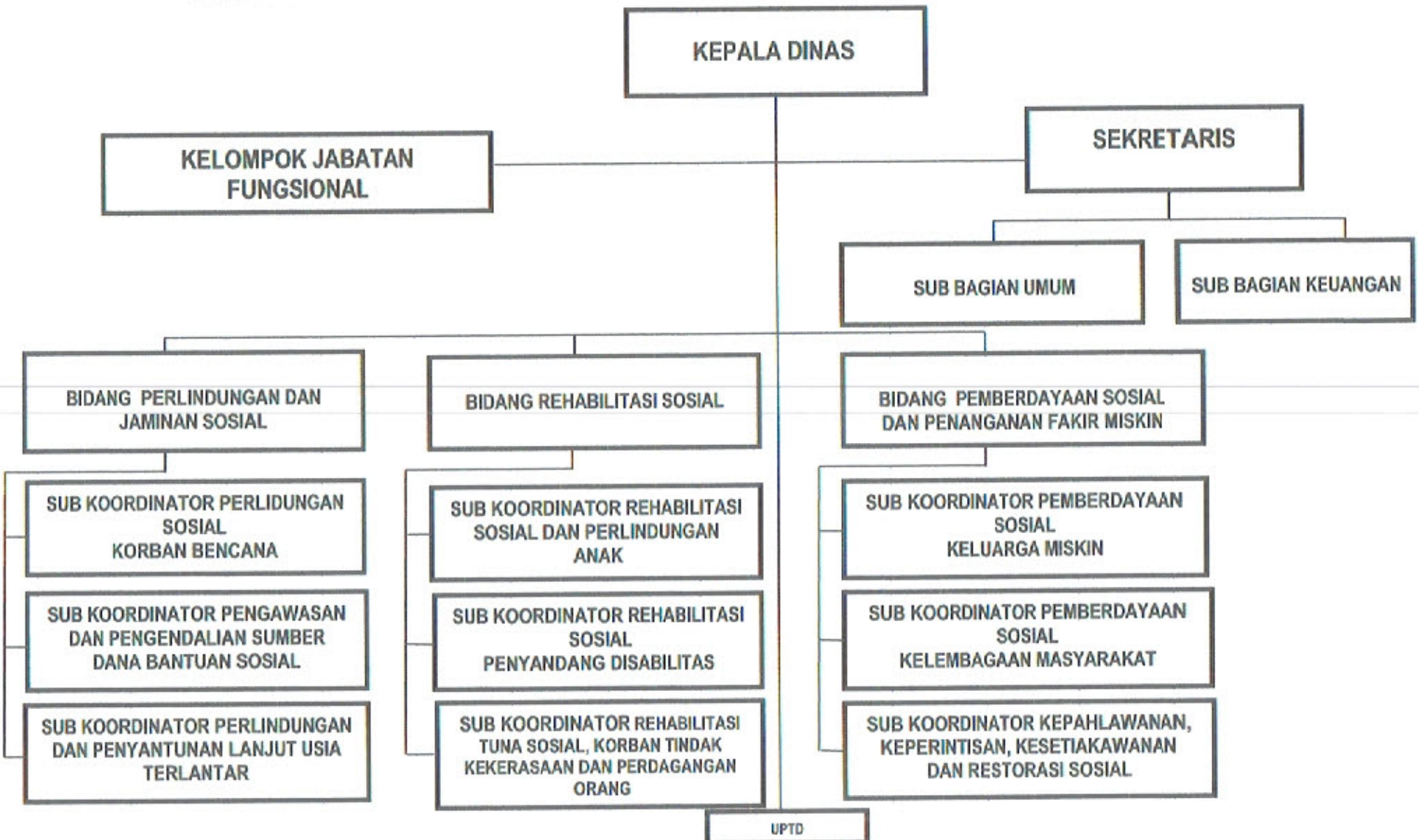
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
a. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi serta bidang sebagai pertanggungjawaban.
e. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

dengan sub bagian

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   a. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin;
   b. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;
   c. Sub Koordinator Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
   a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak;
   b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
   c. Sub Koordinator Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
   a. Sub Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana;
   b. Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial;
   c. Sub Koordinator Perlindungan dan Penyantunan Lanjut usia Terlantar.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU (TYPE B)



2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset.

Keadaan pegawai dan aset pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai

2.2.1.1. Berdasarkan Eselon

Tabel 2.1.

Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	Eselon II	1	-	1	1,49
2	Eselon III	4	0	4	5,97
3	Eselon IV	3	8	11	16,42
4	Non Eselon	9	5	14	20,90
5	THL	28	9	37	55,22
Total		**45**	**22**	**67**	**100**

Per Desember 2021

2.2.1.2. Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2.

Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Golongan

NO	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Golongan IV	6	0	6	20,00
2	Golongan III	7	13	20	66,67
3	Golongan II	3	0	3	10,00
4	Golongan I	1	0	1	3,33
Total		**17**	**13**	**30**	**100**

Per Desember 2021

2.2.1.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3.
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pasca sarjana/S2	5	2	7	26,92
2	Sarjana/S1	5	7	12	46,15
3	Sarjana Muda/Diploma III	1	0	1	3,85
4	SLTA	5	0	5	19,23
5	SLTP	1	0	1	3,85
Totai		**17**	**9**	**26**	**100**

Per Desember 2021

2.2.2 Aset Dinas Sosial

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A - TANAH
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Kode Unit	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Alamat	Luas	Sertifikat	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.1.1.1.4.1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	23	31 Desember 1955	182,880,000	JL. ABDIN	3,048 m²	No. , tanggal	kantor HAK PAKAI
2	1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.1.1.1.4.1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	133	31 Desember 2013	149,100,000	JL. INTEN KORONG	213 m²	No. , tanggal	kantor HAK PAKAI
3	1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.1.1.1.4.1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	140	31 Desember 2015	438,445,000	Kota Rumbai Pebenbera Desa Rumbai Bukit	31.317 m²	No. , tanggal 31.12.2015	Rencana Pembangunan Panti Sosial Kota Rumbai Pebenbera Desa Rumbai Bukit / Ada 2 surat : 1. an. Muti Eliza Un. Pemko uk. 18.000 M2 No. 080300 2. an. Muti Eliza Un. Pemko uk. 13.317 & M2 No. 140007
#	TOTAL NILAI							Rp.770,425,000,-	#	#	#	#

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	DNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	31	31 Desember 2001	6.480.000	ACER ACER						TIDAK DIPAKAI/USANG
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	57	31 Desember 2002	4.462.500	ACER ACER						TIDAK DIPAKAI/USANG
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	131 - 132	31 Desember 2005	28.908.000	LG LG						TIDAK DIPAKAI/USANG
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	307	31 Desember 2008	14.925.000	ACER ACER						DIPAKAI
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	411	31 Desember 2009	14.952.000							DIGUNAKAN
6	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	412	31 Desember 2009	7.950.000							DIPAKAI
7	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	468	31 Desember 2010	232.800.000	THOSIBA THOSIBA						DIUSANG
8	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	469	31 Desember 2010	7.900.000	THOSIBA THOSIBA						DIPAKAI
9	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	1039	31 Desember 2013	8.765.000							DIPAKAI
10	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	1291 - 1293	18 Juni 2014	14.736.600	LENOVO LENOVO						PAKAI
11	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	1354 - 1359	03 November 2014	19.803.818	LENOVO LENOVO						PAKAI
12	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	1614	07 Desember 2015	14.951.575	DELL DELL						KOMPUTER PC
13	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	1943 - 1947	28 Desember 2015	21.030.950	HP HP						
14	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	2028 - 2030	31 Desember 2015	22.186.389	HP HP						KOMPUTER PC
15	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	2810 - 2811	29 Desember 2017	22.950.000	Lenovo Lenovo 21.5"						
16	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	2752 - 2753	24 Mei 2018	16.900.000	LENOVO LENOVO 21"LENOVO A AIO 75						DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU BELANDA SOSIAL PENGENDALIAN KOMUTERISASI, WEB, PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
17	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	PC Unit	4027	30 Agustus 2020	15.080.100	Lenovo Ideacentre A340 22 FOR 21"5 Inch Metal Putih						Bagus Keadaan -

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	P.C Unit	4028	31 Agustus 2020	14.095.100	Lenovo Ideacentat A340-22ICK Intel Core i5 21.5 inch Metal Putih	-	-	-	-	-	Ruangan Kadis -
19	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1.	P.C Unit	1 - 2	19 Februari 2021	19.858.000	DELL OptiPlex 3280 AIO 21.5 Inch Ebonit Hitam	-	-	-	-	-	Bidang Pemberdayaan Sosial (Pelayanan) dan Bidang Rehabilitasi Sosial APBD 2021
20	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.1	P.C Unit	1	19 Februari 2021	17.900.000	LENOVO AIO 3 21.5 inch Ebonit Hitam	-	-	-	-	-	Unit II APBD 2021
21	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.2.	Lap Top	22	31 Desember 2008	29.200.000	TOSHIBA TOSHIBA						DIPAKAI
22	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.2	Lap Top	38 - 39	31 Desember 2009	29.997.500							TDK DIPAKAI
23	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.2.	Lap Top	335 - 337	10 Juni 2014	34.404.264	ASUS ASUS						PAKAI
24	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.1.2.2.	Lap Top	831 - 832	20 Desember 2017	20.400.000	Lenovo Lenovo						
25	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.99.1.2.2.	Lap Top	1 - 2	27 Juli 2021	42.500.000	Mix g63 thin 10Ad (Sn7 - 16412-677) 14 inch ebonit hitam						Bagian Keuangan dari 01 APBD 2021
26	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.99.1.2.3.	Note Book	401 - 404	31 Desember 2015	47.860.000	HP PROC INTEL HP PROC INTEL						NOTE BOOK
27	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.1.12.	Hard Disk	78 - 79	31 Desember 2013	1.500.000							DIPAKAI
28	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.1.12.	Hard Disk	83	31 Desember 2013	750.000							TDK DIPAKAI
29	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.1.18.	Peralatan Mainframe Lain-Lain	22	28 Desember 2015	89.147.000							KOMPUTER MAIN FRME SERVER
30	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.17.	Eksternal Portable Hardisk	6	28 Agustus 2014	752.000	500 GB 500 GB						
31	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.18.	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	3	31 Desember 2008	600.000							GUDANG
32	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	82	31 Desember 2008	3.500.000							DIGUDANG
33	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	116	31 Desember 2009	9.739.570	toshiba toshiba						TDK DIPAKAI
34	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	266	31 Desember 2011	2.124.000	THOSIBA THOSIBA						DIPAKAI

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	267	31 Desember 2011	2.124.000	ACER ACER						DIPAKAI
36	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	441	31 Desember 2012	12.789.000							rusak
37	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	702	31 Desember 2013	2.346.000							DIPAKAI
38	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1012	18 September 2014	8.519.300	HP HP						
39	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1013	18 September 2014	1.052.800	CANON CANON						
40	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1597 - 1600	31 Desember 2015	5.851.000	HP LASER JET HP LASER JET						HP LASER JET
41	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1601 - 1605	31 Desember 2015	24.849.300	BROTHER BROTHER						PRINTER brother
42	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2473	20 Desember 2017	15.600.000	Epson Laser Jet Epson Laser Jet						
43	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.3.3.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2474	20 Desember 2017	6.500.000	Brother Brother						
44	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.4.2.	Router	29 - 30	31 Desember 2015	18.626.089							ROUTER MIKROTIK
45	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.4.2.	Router	37	20 Desember 2017	10.000.000	Roterboard ocr Roterboard ocr						
46	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.4.3.	Hub	35 - 42	31 Desember 2015	5.008.985							
47	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.4.3.	Hub	41 - 42	31 Desember 2015	2.347.784							SWICT 24 PONT
48	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.10.2.4.33.	Peralatan Jaringan Lain-Lain	147 - 152	31 Desember 2015	25.479.436							Acces Point Indor
49	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	29	31 Desember 2002	70.000.000	MITSUBISI MITSUBISI	MHB1NB 70200356	4K017670		BM 7196 AP		DIPAKAI
50	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	131	31 Desember 2009	236.030.834	TOYOTA TOYOTA	MHFXW4161700229227	1TR642162	E6682722D	BM 154 A		SUMBER DARI PERLENGKAPAN
51	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	147	31 Desember 2012	175.990.000	TOYOTA TOYOTA	MPATR58SHCE106141	JV8791		BM 361 A		1586 TP > 361 A > 361A

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Pembelian	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	148	31 Desember 2012	304.786.350	TOYOTA TOYOTA	MHFKW2G2692	1TR6580157	01145810	BM 1338 TP		SUMBER DARI PERLENGKAPAN
53	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	160	17 Juni 2014	188.064.890	TOYOTA TOYOTA 1496 CC	MHKM8CA3JEK018681	2ELM8098	L00529426	BM 1896 TP		PAKAI
54	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	161	17 Juni 2014	188.064.890	TOYOTA TOYOTA 1496 CC	MHKM8CA3JEK018198	2ELJ088	L00529425	BM 1895 TP		PAKAI
55	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	229	31 Desember 2015	299.894.000	Honda Honda	MHRRU1850FJ4195	E1L2E1002643		BM 1048 A		Honda HRV E (VIN 2015)
56	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.2.3.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	230	31 Desember 2015	203.510.000	SUZUKI SUZUKI 1.493 CC	MHYDBN42VFJ404852	G15AED36989	L10809841D	BM 1042 A		Suzuki Aerio SGX LUX R 15
57	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.3.2.	Pick Up	60	31 Desember 2007	151.800.000	FORD FORD	MNBBSBE407W994759	WLAT8612771	E8844375D	BM 9188 AP		SUMBER DARI PERLENGKAPAN
58	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	44	31 Desember 1995	5.500.000	HONDA HONDA	NFGA1EVK111776	NVGAE1110916		BM 3710 AP		RUSAK RINGAN
59	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	61	31 Desember 1997	6.500.000	HONDA HONDA	MH1NFGD0VVK585369	NFGAE1597729		BM 3717 AP		RUSAK RINGAN
60	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	62	31 Desember 1997	6.600.000	HONDA HONDA	MH1HABA85VK004005	HABAE1004051		BM 3704 AP		DIPAKAI
61	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	63	31 Desember 1997	6.000.000	HONDA HONDA	NFGA13VK111734	NFGAE1112794		BM 3711 AP		DIPAKAI
62	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	64	31 Desember 1997	6.000.000	HONDA HONDA	MH1HA0005SK396574	HAEJ296282		BM 3114 AP		3704 AP > 3114 AP DIPAKAI
63	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	65	31 Desember 1997	7.000.000	HONDA HONDA	HABA1GVK05917	HABAE 1003995	A6555648D	BM 3790 AP		DIPAKAI
64	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	67	31 Desember 1997	7.600.000	HONDA HONDA	HABA17VK004037	HAHAE1004099	665565410D	BM 3757 AP		DIPAKAI
65	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor	68	31 Desember 1997	6.500.000	HONDA HONDA	MH1KW2G65239	1TR6117984	00031072	BM 3767 AP		DIPAKAI

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.08.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	69	31 Desember 1997	6.500.000	HONDA HONDA	MHX8CA4J9K62	DOE5481	J00063539	BM 3755 AP		DIPAKAI
67	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	70	31 Desember 1997	6.500.000	HONDA HONDA	MHFKW8161702Z2927	13R6482162	0.0562722D	BM 3774 AP		DIPAKAI
68	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	71	31 Desember 1997	6.500.000	HONDA HONDA	MHFXWK2G692	13R6840857	0814570	BM 3758 AP		DIPAKAI
69	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	158	31 Desember 2002	9.000.000	HONDA HONDA	NTA185K11809	HNFGAE1112916	A8054588D	BM 2062 AP		DIPAKAI
70	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	626	02 September 2014	17.259.253	HONDA HONDA 124.8 CC	MHJBG105EK175220	JBG1E1174658		BM 3935 TP		3885 TP > 3935 TP DIPAKAI
71	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	627	02 September 2014	17.259.253	HONDA HONDA 124.8 CC	MHJFK116EK216121	JFK1E1209763	L 92561222	BM 3936 EP		PAKAI
72	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	698	31 Desember 2015	29.045.000	HONDA HONDA 149.3 CC	MH1JFV116FK034652	JFV1E1034202		BM 2018 A		VARIO
73	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.4.1.	Sepeda Motor	699	31 Desember 2015	29.045.000	HONDA HONDA 149.3 CC	MH1JFV110FK041651	JFV1E1041632		BM 2020 A		VARIO
74	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.2.1.6.1.	Mobil Ambulance	37	24 Maret 2015	216.300.000	Suzuki Suzuki	MHYGDN42VEJ406247	G15AED34978		BM 7002 A		Hibah dari Indomaret
75	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.3.1.7.4.	Mesin Tenun Tekstil	1 - 2	31 Desember 2008	92.000.000							TDK DIPAKAI
76	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.4.1.4.4.	Rak/Rak Penyimpan	17	28 Desember 2015	15.027.000							Rak barang
77	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.4.1.4.5.	Lemari Penyimpan	70	21 Desember 2015	192.101.000							Lemari tempahan Arsip
78	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.4.1.4.5.	Lemari Penyimpan	87	08 November 2016	168.132.000	Lemari Tempahan Lemari Tempahan Besar Kayu						Aparatur DPD Lemari Penyimpanan Perlengkapan Kantor
79	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.1.2.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inch)	55	31 Desember 2005	2.121.000	OLYMPIC OLYMPIC						TIDAK DIPAKAI/GUDANG
80	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.1.2.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inch)	69	31 Desember 2007	14.144.340							TDK DIPAKAI
81	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.9.1.2.13.	Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lain-Lain	1	18 Desember 2008	800.000							DIPAKAI

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.2	Lemari Kayu	1818 - 1821	22 Desember 2017	10.340.000	DN DN 3.25m x 2m						
83	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.27	Lemari Kaca	4 - 5	31 Desember 2001	1.666.000	TEMPAHAN TEMPAHAN						TDK DIPAKAI
84	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.29.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	44	31 Desember 2001	2.660.000	TEMPAHAN TEMPAHAN						GUDANG
85	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.29.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	45	31 Desember 2001	500.000	OLIMPIC OLIMPIC						RUSAK RINGAN
86	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.29.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lain-Lain	91	31 Desember 2007	7.000.000							DIPAKAI
87	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.3.	Rak Besi	116	28 Desember 2015	5.009.000							Rak Piring Aluminium
88	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.4.	Rak Kayu	36	31 Desember 2009	49.175.000	TEMPAHAN TEMPAHAN						DIPAKAI
89	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	86	31 Desember 1999	700.000	DATA SKRIPT DATA SKRIPT						HIBAH KANWIL DEPSOS
90	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	70	31 Desember 2000	600.000	YUNIKA YUNIKA						TIDAK DIPAKAI
91	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	152	31 Desember 2002	600.000	ELITE ELITE						TIDAK DIPAKAI/GUDANG
92	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	153	31 Desember 2002	850.000	BIG STAR BIG STAR						DIPAKAI
93	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	154	31 Desember 2002	859.000	UNITAL UNITAL						DIPAKAI
94	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	315	31 Desember 2004	1.000.000	EMBOSET EMBOSET						DIPAKAI
95	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	356	31 Desember 2005	1.535.000	FUTURA FUTURA						TDK DIPAKAI
96	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	397	31 Desember 2007	11.091.158							FAKAI
97	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	1166	12 November 2014	12.408.668	VIP VIP						Filing Kabinet
98	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.5.	Filing Cabinet Besi	1387 - 1431	31 Desember 2015	52.067.000							

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.7.	Brandkas	13	31 Desember 2002	3.200.000	LION LION						PAKAI
100	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.4.7.	Brandkas	43	31 Desember 2008	5.500.000	UCHIDA UCHIDA						DIPAKAI
101	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.12.	Mesin Absensi	4	31 Desember 2009	102.500.000							TDK PAKAI
102	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.12.	Mesin Absensi	265	10 Februari 2020	5.089.800	- - - Metal Putih	-	-	-	-	-	Bagian Umum -
103	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.2.	CCTV - Camera Contact Television System	110	28 Desember 2015	15.027.000							Camera CCTV
104	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.43.	LCD Projector/Infocus	1	25 Februari 2021	9.056.000	Epson EB-W51 3D cm Etend Full	-	-	-	-	-	Sekretariat APBD 2021
105	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.5.	White Board	63	31 Desember 2012	1.250.000							GUDANG
106	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.5.	White Board	64 - 69	31 Desember 2012	2.500.000							DIPAKAI
107	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.5	White Board	79 - 83	31 Desember 2013	3.750.000							DIPAKAI
108	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.5	White Board	201 - 202	31 Desember 2015	3.000.000							
109	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.1.5.77.	Papan Pengumuman	539	26 Nopember 2014	4.512.354	KAYU						PAKAI
110	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.14.	Meja Resepsionis	22	31 Desember 2008	13.500.000							GUDANG
111	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.16.	Meja Tambahan	3	31 Desember 2001	553.600	TAMPAHAN TAMPAHAN						TIDAK DIPAKAI
112	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.2.	Meja Kerja Kayu	456	31 Desember 2015	99.003.000	Tempah						Meja Security
113	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.24.	Meja 1/2 Biro	25	31 Desember 2001	525.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						DIPAKAI
114	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.24.	Meja 1/2 Biro	32	31 Desember 2002	560.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						DIPAKAI
115	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.24.	Meja 1/2 Biro	78	31 Desember 2004	2.100.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						TIDAK DIPAKAI
116	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.24.	Meja 1/2 Biro	162	31 Desember 2005	3.300.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						DIPAKAI

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Pembelian	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.30.	Kursi Rapat	4	31 Desember 2007	5.000.000							TDK DIPAKAI
118	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.30.	Kursi Rapat	48	31 Desember 2008	10.500.000							DIPAKAI
119	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.30.	Kursi Rapat	1341 - 1353	22 Desember 2015	64.158.000							Kursi Rapat Besar
120	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.31.	Kursi Tamu	1	31 Desember 1997	3.000.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						DIPAKAI
121	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.31.	Kursi Tamu	15	31 Desember 2001	595.000	TEMPAHAN TEMPAHAN						DIPAKAI
122	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.31.	Kursi Tamu	989 - 1002	22 Desember 2015	9.097.000							Kursi Tamu Besi
123	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.32.	Kursi Putar	77	31 Desember 2002	2.210.000	BIG STAR BIG STAR						HIBAH KANWIL DEPSOS
124	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.32.	Kursi Putar	78	31 Desember 2002	2.080.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						DIPAKAI
125	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.32.	Kursi Putar	79	31 Desember 2002	2.210.000	BIG STAR BIG STAR						DIPAKAI
126	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.32.	Kursi Putar	80	31 Desember 2002	2.210.000	BIG STAR BIG STAR						TIDAK DIPAKAI
127	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.32.	Kursi Putar	81	31 Desember 2002	900.000	INDACHI INDACHI						TIDAK DIPAKAI/GUDANG
128	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.33.	Kursi Biasa	21	31 Desember 2007	3.850.000							TDK DIPAKAI
129	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.33.	Kursi Biasa	61	31 Desember 2008	7.500.000							GUDANG
130	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.36.	Kursi Lipat	8	31 Desember 2005	11.250.000	FUTURA FUTURA						DIPAKAI
131	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.36.	Kursi Lipat	9	31 Desember 2006	2.400.000	YUNIKA YUNIKA						DIPAKAI
132	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.36.	Kursi Lipat	10	31 Desember 2005	4.088.000	NATIONAL NATIONAL						DIPAKAI
133	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.68.	Sofa	5	31 Desember 2005	2.750.000							DIPAKAI
134	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.68.	Sofa	13	31 Desember 2007	5.000.000							TDK DIPAKAI/GUDANG

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.46.	Sofa	248	28 Desember 2015	19.027.000							1 Set
136	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.8.	Meja Rapat	19	31 Desember 2006	6.270.000	FUTURA FUTURA						DIPAKAI
137	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.8.	Meja Rapat	291	22 Desember 2015	34.031.000							Meja Rapat Oval
138	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.8.	Meja Rapat	292	22 Desember 2015	69.677.000							Meja Rapat Panjang
139	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.9.	Tempat Tidur Besi	127 - 166	30 Desember 2015	47.934.000							Tempat Tidur Shelter
140	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.1.9.	Tempat Tidur Besi	167	31 Desember 2015	11.019.000							Tempat Tidur Tempohan
141	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.2.3.	Jam Elektronik	1 - 3	31 Desember 2009	1.800.000							TDK DIPAKAI
142	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.3.1.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	55	31 Desember 2015	15.027.000							VAKUM CLEANER
143	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.3.3.	Mesin Pemotong Rumput	64	28 Desember 2015	5.009.000							
144	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.3.4.	Mesin Cuci	6 - 7	28 Desember 2015	14.024.000	LG LG						Mesin Cuci Shelter Pasi Asuhan
145	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.1.	Lemari Es	196 - 197	31 Desember 2015	10.018.000	PANASONIC PANASONIC						KUKAS 2 PINTU
146	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	16	31 Desember 2002	2.500.000	NATIONAL NATIONAL						TIDAK DIPAKAI
147	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	54 - 56	31 Desember 2005	12.097.000	MITSUBISI MITSUBISI						DIPAKAI
148	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	158	31 Desember 2006	19.800.000	PANASONIK PANASONIK						DIPAKAI
149	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	1013	16 Agustus 2017	6.424.375	Sharp PCS 0022303 Sharp PCS 0022303 Plastik						Air Conditioner (01 B/SP80/APBD/KP/A/SEKRETDPRKP/2017)
150	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	1014 - 1028	16 Agustus 2017	61.365.625	Sharp PCS 0022303 Sharp PCS 0022303 Plastik						Air Conditioner (01 B/SP80/APBD/KP/A/SEKRETDPRKP/2017)
151	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4.	A.C. Split	1201 - 1203	02 April 2018	39.750.000	SHARP SHARP 2 PK LDGKN1 LDGT1						DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU BELANJA MODAL PENGADAAN AC SPLIT KEG. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Pengadaan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.4	A.C. Split	1 - 2	08 Februari 2021	19.800.000	Daikin FTDSONV1K RDSONV1K 2 PK Ebonit PUH	-	-	-	-	-	Ruang Keuangan APBD 2021
153	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.6	Kipas Angin	1	31 Desember 2001	638.000	NATIONAL NATIONAL						TIDAK DIPAKAI/GUDANG
154	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.6	Kipas Angin	3	31 Desember 2005	1.200.000	MASPION MASPION						DIPAKAI
155	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.6	Kipas Angin	2	31 Desember 2007	800.000							TDK DIPAKAI
156	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.6	Kipas Angin	402 - 411	31 Desember 2015	15.027.000							KIPAS ANGIN MASPION
157	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.4.7	Exhaust Fan	162 - 163	01 Desember 2020	5.980.000	PANASONIC EXHAUST FAN SEDANG PLASTIK PUTIH						RUANGAN KEPALA DINAS DAN SEKRETARIS EXHAUST FAN
158	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.5.2	Kompor Gas (Alat Dapur)	2	31 Desember 2009	800.000							GUDANG
159	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.5.5	Oven Listrik	1	31 Desember 2013	14.800.000	yona yona						tdk ditemukan ranglokannya
160	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.5.9	Tabung Gas	1	31 Desember 2008	1.000.000							
161	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.5.9	Tabung Gas	2 - 3	31 Desember 2009	1.200.000							GUDANG
162	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.1	Radio	0	31 Desember 2008	2.370.000							TDK DIPAKAI
163	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.10	Laser Disc	1	31 Desember 2001	680.000	SONY SONY						TIDAK DIPAKAI
164	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.12	Wireless	2	31 Desember 2005	11.000.000	TOA TOA						DIPAKAI
165	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.18	Unit Power Supply	267	28 Desember 2015	37.020.618	ICA ICA						
166	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.2	Televisi	71	31 Desember 2008	7.400.000							DIPAKAI
167	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.2	Televisi	548 - 550	28 Desember 2015	40.070.000	Toshiba Toshiba						Toshiba 50
168	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.22	Camera Slr	16	31 Desember 2011	3.750.000							DIPAKAI

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.26.	Mesin Jahit	1 - 2	31 Desember 2000	11.640.000	SINGER SINGER						GUDANG
170	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.56.	Dispenser	4	31 Desember 2008	6.250.000							DIPAKAI
171	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.38.	Dispenser	237 - 244	28 Desember 2015	16.028.000							DISPENSER SELBER
172	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.39.	Mimbar/Podium	25	28 Desember 2015	4.007.000							Podium Panggung
173	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.5.	Amplifier	47	31 Desember 2013	3.422.215	TOA TOA						DIPAKAI
174	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.77.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	1.808 - 1.837	31 Desember 2015	30.053.000							
175	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.77.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	1438	31 Desember 2015	29.803.000							KARPET BULUTO METER
176	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.77.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	1439	31 Desember 2015	15.627.000							KARPET BIASA 130 M
177	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.77.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-Lain	1440	31 Desember 2015	49.588.000							Tali Jendela / Pvc, 66 Meter
178	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.2.6.8.	Sound System	3	31 Desember 2005	10.900.000							TDK DIPAKAI
179	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.4.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	26	31 Desember 2014	9.500.000							Meja 1 biro
180	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.4.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	31	22 Desember 2015	8.182.000							Meja Kerja Kacik
181	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.5.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	59	31 Desember 2013	3.400.000							Meja Kerja 1/2 Biro + Laci Untuk Eselon III 1 Unit
182	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.5.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	123 - 125	27 September 2018	8.982.000	PEWEI 1268 15' Elegan PEWEI 1268 15' Elegan Sedang Kaya						Eselon III Meja Kerja Eselon III 4 Unit
183	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.6.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	74	31 Desember 2013	3.380.000							Meja kerja 1/2 Biro Pejabat Eselon IV sebanyak 6 Unit
184	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.6.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	228 - 230	22 Desember 2015	68.430.000							Meja Kerja

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.6.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	309 - 400	27 September 2018	3.960.000	PEWEI 1268 13' Elegan PEWEI 1268 13 Elegan Sedang Kayu						Eselon IV Meja Kerja Eselon IV 10 Unit
186	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.8.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	716 - 718	22 Desember 2015	69.662.000							Meja Kerja Staff
187	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.1.9.	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	23	31 Desember 2007	7.150.000							TDK DIPAKAI
188	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.3.4.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	31 Desember 2005	15.950.000	BIG STAR BIG STAR						DIPAKAI
189	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.3.4.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	38	22 Desember 2015	6.832.000							Kursi Tempatan
190	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.3.8.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	615 - 644	22 Desember 2015	144.109.000							Kursi Kerja
191	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.3.8.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	923 - 925	22 Desember 2017	5.849.000	DN DN						
192	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.5.4.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	14 - 15	22 Desember 2015	3.747.000							Kursi Hadap
193	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.6.13.	Wallkota Lain-Lain	15 - 15	22 Desember 2017	9.537.000	DN DN						
194	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.7.7.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	31	31 Desember 2001	600.000	TIP TOP TIP TOP						DIPAKAI
195	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.5.3.7.7.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	73	31 Desember 2006	5.053.000	TAMPAHAN TAMPAHAN						DIPAKAI
196	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.6.1.2.105.	Layar Film/Projector	13	31 Desember 2007	35.000.000							DIPAKAI
197	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.6.1.2.126.	Camera Digital	1	19 Februari 2021	17.600.000	Canon EOS 77 D DSLR Camera 18-55 mm Lens Ebonit Hitam	-	-	-	-	-	Jurnalis OPD APBD 2021
198	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.6.1.2.3.	Camera Electronic	107	16 September 2014	9.877.040	NIKKON NIKKON						
199	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.6.1.2.3.	Camera Electronic	185 - 186	28 Desember 2015	20.035.000	Canon Canon						SLR Canon 700
200	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.6.2.1.1.	Telephone (PABX)	63	28 Desember 2015	36.062.000	Panasonic Panasonic						
201	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.6.2.1.6.	Handy Talky (HT)	222 - 225	28 Desember 2015	12.622.000	Firstcom Firstcom						Handytalkie

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Spesifikasi	Nomor					Keterangan
									Rangka	Mesin	BPKB	No. Polisi	STNK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.7.1.20.1.	Alat Kedokteran Lainnya Lain-Lain	35	31 Desember 2011	1.750.000							DIPAKAI
203	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.1.12.24.	Stabilizer	2	31 Desember 2008	5.800.000							DIGUDANG
204	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.1.12.24.	Stabilizer	3	31 Desember 2009	1.750.000							PAKAI
205	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.1.12.24.	Stabilizer	4	31 Desember 2009	1.750.000							DIPAKAI
206	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.1.55.12.	Alat Tangki Pengapungan	1 - 3	31 Desember 2009	3.800.000							GUDANG
207	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.1.64.1.	Unit Alat Laboratorium Lainnya Lain-Lain	2	31 Desember 2012	24.908.270							DIPAKAI
208	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.3.11.4.	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olah Raga Lain-Lain	4	05 Oktober 2018	6.268.880	POWER SPIN POWER SPIN						
209	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.2.8.3.2.47.	Papan Tulis Berkotak	1	31 Desember 2006	899.000	TEMPAHAN TEMPAHAN						DIPAKAI
#	TOTAL NILAI						Rp.5,382.892.120,-	#	#	#	#	#	#	#

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C - GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN 2021

Kode Unit : **1.06.0.00.0.00.01.**
Unit : **Dinas Sosial**
Sub Unit : **Dinas Sosial**

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Alamat	Luas	IMB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.3.1.1.1.1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	44	31 Desember 2007	114.642.000	JL ZAINAL ABIDIN	130	No : Tanggal	IDKA BINA KARYA
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.3.1.1.1.1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	45	31 Desember 2007	606.076.000	JL. INTENKDRONG	565	No : Tanggal	LBK
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.3.1.1.13.1.	Gedung Pos Jaga Permanen	2	31 Desember 2007	197.650.000	JL.ABIDIN	78	No : Tanggal	RUMAH JAGA LBK
4	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.3.1.1.2.1.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	31 Desember 2007	83.014.000	JL. ABIDIN	128	No : Tanggal	
5	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.3.1.2.4.1.	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	31 Desember 2007	378.118.000	JL. ABIDIN	100	No : Tanggal	BANGUNAN PENDOPO
#	TOTAL NILAI						Rp.1,379.706,000,-	#	#	#	#

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D - JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Alamat	Luas	IMB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.4.3.6.3.1.	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	1	31 Desember 2013	4,500,000	JL. ABIDIN			PEMASANGAN INSATASI LISTRIK RECLASS KIB C
2	Dinas Sosial	Dinas Sosial	3.4.4.1.4.4.	Jaringan Sambungan Ke Rumah Lain-Lain	3	31 Desember 2013	20,000,000	JL ABIDIN			SUMUR BOR
#	TOTAL NILAI						Rp.24,500,000,-	#	#	#	#

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E - ASET TETAP LAINNYA
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Buku / Perpustakaan			Barang Bercorak		Hewan / Ternak dan Tumbuhan		Keterangan
								Judul Buku	Penerbit Buku	Pencipta	Asal Barang	Bahan Barang	Jenis Tanaman	Ukuran Tanaman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
#	TOTAL NILAI						Rp.0,-	#	#	#	#	#	#	#	#

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN 2021

Kode Unit : 1.06.0.00.0.00.01.
Unit : Dinas Sosial
Sub Unit : Dinas Sosial

No	Unit	Sub Unit	Kode Barang	Barang	Register	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Jenis KDP	Alamat	Dokumen	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	TOTAL NILAI						Rp.0,-	#	#	#	#

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
S/D TAHUN 2026

PEMERINTAH
PROVINSI : RIAU
KABUPATEN / KOTA : PEKANBARU
PENGGUNA BARANG : DINAS SOSIAL

No	Program/Kegiatan /Output	Usulan BMD				Kebutuhan Maksimum		Data Daftar Barang Yang Dapat Dioptimalisasikan				Kebutuhan Riil Barang Milik Daerah		Ket
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A. Program													
	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur													
	1. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional													
	a. Output													

	Tersedianya alat angkut Barang	03.01.03	Kendaraan bermotor Angkutan Barang											
		03.01.03.02	Pick Up	1	Unit	4	Unit	03.01.03.02	Pick Up	1	Unit	3	Unit	Untuk Penjangkauan PMKS
	2. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor													
	a. Output													
	Tersedianya peralatan kantor	06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	8	Unit	06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	7	Unit	Untuk Keuangan
		06.02.04.04	AC Split	1	Unit	45	Unit	06.02.04.04	AC Split	12	Unit	33	Unit	Untuk Selter
		06.02.06.03	Televisi	1	Unit	8	Unit	06.02.06.03	Televisi	4	Unit	4	Unit	Untuk Layanan
		06.03.02.01	PC. Unit	12	Unit	94	Unit	06.03.02.01	PC. Unit	28	Unit	66	Unit	
		06.03.02.02	Laptop	2	Unit	16	Unit	06.03.02.02	Laptop	12	Unit	4	Unit	
		06.03.04.08	Printer	15	Unit	94	Unit	06.03.04.08	Printer	20	Unit	74	Unit	

		10.05.01.04	CCTV	2	Unit	9	Unit	10.05.01.04	CCTV	2	Unit	7	Unit	Untuk Selter
		Xxxx	Tripod (Gimbal Stabilizer)	1	Unit	2	Unit	xxxx	Tripod (Gimbal Stabilizer)	0	Unit	2	Unit	
	Tersedianya Alat Komunikasi	Xxxx	Drone	1	Unit	2	Unit	xxxx	Drone	0	Unit	2	Unit	
		Xxxx	Benner Animasi	1	Unit	4	Unit	xxxx	Benner Animasi	0	Unit	4	Unit	Otomatis (berjalan)
	2. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor													
	a. Output													
	Tersediannya Perlengkapan Kantor	06.01.04.02	Rak Besi/ Metal	2	Unit	10	Unit	06.01.04.02	Rak Besi/ Metal	6	Unit	4	Unit	
		Xxxxx	Lemari Besi utk arsip	1	Unit	5	Unit	xxx	Lemari Besi utk arsip	0	Unit	5	Unit	Tahan Api

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
S/D TAHUN 2026

PEMERINTAH PROVINSI : RIAU
KABUPATEN / KOTA : PEKANBARU
PENGGUNA BARANG : DINAS SOSIAL

No	Program/Kegiatan/Output	Barang Yang Dipelihara								Usulan Kebutuhan Pemeliharaan			Ket
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			Nama Pemeliharaan	Jumlah	Satuan	
							B	RR	RB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	A. Program												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran												
	1. Kegiatan												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional												
	a. Output	03.01.02.03	Kendaraan Roda Empat (Mini Bus/ Penumpang 14 orang kebawah)	10	Unit	Operasional	8	0	2	Servis Rutin, Pengantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Pelumas, Belanja STNK	12	Unit	8 Unit service rutin, 2 Unit Pengecatan dan Service Berat

		03.01.03.01	Kendaraan Roda Empat (Truck + Attachhment)	1	Unit	Operasional	1	0	0	Servis rutin, Pengantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Pelumas, Belanja STNK	1	Unit	1 Unit service rutin (Pinjam pakai dari Kemensos)
		03.01.03.02	Kendaraan Roda Empat (Pick Up/ Rescue)	1	Unit	Operasional	0	1	0	Servis rutin, Pengantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Pelumas, Belanja STNK	1	Unit	1 Unit Service Berat (Pinjam pakai dari Kemensos)
		03.01.05.01	Kendaraan Roda Dua	18	Unit	Operasional	15	0	3	Servis rutin, Pengantian Suku Cadang, Belanja BBM/Gas dan Pelumas, Belanja STNK	15	Unit	15 Unit Service Rutin, 3 Unit Rusak Berat
	2. Kegiatan												
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja												
	a. Output	06.02.04.04	AC Split	9	Unit		8	1	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	9	unit	8 Unit Service Rutin, 1 Unit Service Berat

		06.03.02.01	PC. Unit	28	Unit		21	7	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	28	unit	21 Unit Service Rutin, 7 Unit Rusak Ringan
		06.03.02.02	Laptop	8	Unit		6	2	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	8	unit	6 Unit Service Rutin, 2 Unit Rusak ringan
		06.03.02.03	Note Book	4	Unit		4	0	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	4	unit	4 Unit Service Rutin
		06.03.04.08	Printer	20	Unit		17	3	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	20	unit	17 Unit Service Rutin 3 Unit Service Berat
		06.03.06.02	Router	3	Unit		2	1	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	3	unit	2 Unit Service Rutin, 1 Unit Service Berat
		06.03.06.03	Hub	10	Unit		9	1	0	Servis Rutin, Perbaikan dan Pengantian Sparepart	10	unit	9 Unit service rutin, 1 Unit Service Berat

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial				30.00	40.00	50.00	65.00	70.00	79.69	60.53	84.34	73.06	n/a	265.63	151.33	168.68	112.40	n/a
2	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.				50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	60.2	81.2	83.16	81.43	n/a	120.40	135.33	118.80	101.79	n/a

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,550,968,533	2,303,608,644	1,937,469,347	N/A	N/A	2,109,359,082	1,928,012,364	1,527,147,779	N/A	N/A	82.69	83.70	78.82	N/A	N/A	-13%	-15%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	59,000,000	-	234,675,626	N/A	N/A	58,650,000	-	34,004,200	N/A	N/A	99.41	-	14.49	N/A	N/A	-50%	-50%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11,200,000	-	-	N/A	N/A	11,200,000	-	-	N/A	N/A	100.00	-	-	N/A	N/A	-50%	-50%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	50,000,000	-	N/A	N/A	44,000,000	42,000,000	-	N/A	N/A	88.00	84.00	-	N/A	N/A	-50%	-52%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	7,456,000	8,794,000	11,660,400	N/A	N/A	7,456,000	5,878,000	11,660,400	N/A	N/A	100.00	66.84	100.00	N/A	N/A	25%	39%
Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	647,232,400	1,364,134,490	1,362,843,275	N/A	N/A	636,507,650	934,180,544	1,182,085,970	N/A	N/A	98.34	68.48	86.74	N/A	N/A	55%	37%
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	995,628,191	1,175,730,470	1,593,123,073	N/A	N/A	957,758,691	829,844,485	1,027,806,360	N/A	N/A	96.20	70.58	64.52	N/A	N/A	27%	5%
Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	176,745,000	244,642,436	-	N/A	N/A	173,724,300	178,794,430	-	N/A	N/A	98.29	73.08	-	N/A	N/A	-31%	-49%
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	232,208,000	202,909,850	-	N/A	N/A	223,324,250	134,785,500	-	N/A	N/A	96.17	66.43	-	N/A	N/A	-56%	-70%

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	144,702,800	416,309,617	185,588,850	N/A	N/A	130,766,100	403,773,700	179,328,750	N/A	N/A	90.37	96.99	96.63	N/A	N/A	66%	77%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	N/A	5,798,624,771	10,998,908,622	N/A	N/A	N/A	4,928,763,458	N/A	N/A	N/A	N/A	85.00	N/A	89.68%	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	N/A	N/A	N/A	262,906,996	681,465,977	N/A	N/A	N/A	216,134,675	N/A	N/A	N/A	N/A	82.21	N/A	159.20%	-
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	N/A	N/A	N/A	-	49,976,080	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	0.00%	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	N/A	N/A	N/A	1,757,943,628	2,163,594,295	N/A	N/A	N/A	764,225,150	N/A	N/A	N/A	N/A	43.47	N/A	23.08%	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	N/A	N/A	N/A	1,305,317,205	1,879,061,479	N/A	N/A	N/A	612,658,795	N/A	N/A	N/A	N/A	46.94	N/A	43.95%	-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	N/A	N/A	N/A	448,573,420	473,684,996	N/A	N/A	N/A	199,606,200	N/A	N/A	N/A	N/A	44.50	N/A	5.60%	-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	N/A	N/A	N/A	116,400,000	213,615,760	N/A	N/A	N/A	99,600,000	N/A	N/A	N/A	N/A	85.57	N/A	83.52%	-

Tabel 2.6.
Capaian SPM Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Pertahun														
			2017			2018			2019			2020			2021		
			DATA YG ADA	JLH YANG DIBANTU	%	DATA YG ADA	JLH YANG DIBANTU	%	DATA YG ADA	JLH YANG DIBANTU	%	DATA YG ADA	JLH YANG DIBANTU	%	DATA YG ADA	JLH YANG DIBANTU	%
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilatas sosial di luar panti	1011	37	4	1194	48	4	639	400	63	40	40	100	90	90	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	178	1	1	300	21	7	11	11	100	1	1	100	14	14	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilatasi sosial diluar panti	906	82	9	443	218	49	492	285	58	21	21	100	34	34	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	34	27	79	100	36	36	91	91	100	138	138	100	191	191	100

		dasar tuna osial di luar panti															
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	635	635	100	714	442	62	115	115	100	82	82	100	1157	1157	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Keberhasilan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mencapai sasaran ditentukan oleh kemampuan Dinas dalam menggunakan kecakapan, peralatan dan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diharapkan didapatkan suatu hasil yang efektif dan efisien, dengan menggunakan analisis SWOT untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari dalam maupun tantangan dan ancaman dari luar lingkungan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Hasil identifikasi faktor - faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

2.4.1 Lingkungan Internal meliputi :

STRENGHT (KEKUATAN)

- Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota;
- Perda No 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial;
- Perda Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan OPD, Struktur Organisasi Tata Kerja;
- Perwako Nomor : 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup.

WEAKNESS (KELEMAHAN)

- Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan sosial;
- Kurangnya profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas penyelenggara kesejahteraan sosial;

- Kurangnya Pemahaman Instansi Terkait Kesejahteraan Sosial
- Belum optimalnya dukungan dari instansi terkait dan peran serta masyarakat;
- Belum memadainya anggaran dalam pelayanan sosial.

2.4.2 **Lingkungan eksternal** meliputi :

OPORTUNITY (PELUANG)

- UU No 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial;
- Permensos No 8 tahun 2012 tentang jenis dan kriteria PMKS;
- Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cukup tinggi;
- Perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial relative tinggi.

THREAT (ANCAMAN)

- Belum adanya persamaan persepsi stakeholder pentingnya masalah pembangunan kesejahteraan sosial;
- Pertumbuhan dan perkembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cukup tinggi;
- Perkembangan kota yang semakin pesat yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Tabel 2.7.
Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	- Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial - Perda Nomor : 9 tahun 2016 tentang Pembentukan OPD, Struktur Organisasi dan Tata Kerja - Perwako Nomor : 97 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru - Jumlah Sumber Daya Manusia yang Cukup	- Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan sosial; - Kurangnya profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petugas penyelenggara kesejahteraan sosial; - Belum optimalnya dukungan dari instansi terkait dan peran serta masyarakat; - Belum memadainya anggaran dalam pelayanan sosial.
PELUANG (O) - UU No 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial; - Permensos no 8 tahun 2012 tentang jenis dan kriteria PMKS; - Peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) cukup tinggi; - Perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial relative tinggi.	STRATEGI S + O - Optimalkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dinas sosial kota pekanbaru. - Optimalkan sumber daya manusia dan profesionalisme petugas penyelenggara kesejahteraan sosial.	STRATEGI W + O - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan tingkatkan PSKS sebagai mitra kerja dalam pembangunan kesejahteraan sosial; - Optimalkan dukungan dengan instansi terkait sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial semakin meningkat - optimalkan dukungan Anggaran
TANTANGAN (T) - Belum adanya persamaan persepsi stakeholder pentingnya masalah pembangunan kesejahteraan sosial; - Pertumbuhan dan perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) cukup tinggi; - Perkembangan kota yang semakin pesat yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.	STRATEGI S + T - Optimalkan sosialisasi tentang pembangunan kesejahteraan sosial kepada stake holder agar tercipta persamaan persepsi. - Manfaatkan Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial sebagai mitra kerja penunjang usaha PPKS dalam melaksanakan usaha mandiri.	STRATEGI W + T - Tingkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial agar mampu menekan pertumbuhan PPKS. - Lakukan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat agar berperan serta dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah faktor- faktor kunci keberhasilan (Critical sucsess factor) :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani masalah pembangunan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana pelayanan Sosial;
3. Mengoptimalkan peran PSKS sebagai mitra kerja;
4. Meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahhteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Riau sebagaimana tabel berikut.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih kurangnya pelayanan terhadap PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Belum Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan Sosial bagi PPKS	Belum Optimalnya Verifikasi dan Validasi Data PPKS
			Belum Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PPKS
			Belum terkoordinirnya nya perlindungan, Jaminan, Rehabilitasi serta Pemberdayaan Sosial dengan baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum Optimalnya Kebutuhan Saranan dan Prasarana Pelayanan PPKS
			Belum tercapainya system pelayanan dan penanganan masalah terkait PPKS.
2	Masih kurangnya Peran PSKS dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial	Belum Optimalnya SDM PSKS yang menangani PPKS	Belum Optimalnya SLRT
			Belum Terberdayakannya seluruh PSKS yang ada
			Belum terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan PSKS yang ada
			Belum Optimalnnya Pengawasan Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang
			Masih rendahnya nilai nilai kepahlawanan dan kesejahteraan sosial

Tabel 3.2.
Data PMKS Tahun 2017 s/d 2021

NO	KATEGORI PMKS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Anak Balita Terlantar	12	17	1	4	14
2	Anak Terlantar	187	283	11	1	14
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	42	13	4	4	2
4	Anak Jalanan	65	9	28	85	52
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	284	422	227	6	16
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	24	7	0	0	3
7	Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan	33	20	15	9	2
8	Lanjut Usia Terlantar	975	443	492	21	34
9	Orang Dengan Kedisabilitasan	576	772	412	34	74
10	Tuna Susila	73	60	60	23	1
11	Gelandangan	95	65	22	11	97
12	Pengemis	58	35	69	127	94
13	Pemulung	339	495	495	901	4
14	Kelompok Minoritas	5	20	20	0	0
15	Orang Dengan HIV/AIDS	102	2	2	0	0
16	Korban Eks Napza	71	148	148	0	0
17	Korban Trafficking	7	5	5	0	0
18	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	N/A	N/A	0	0	0
19	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	143	200	200	0	0
20	Korban Bencana Alam	609	629	12	25	988
21	Korban Bencana Sosial	88	85	103	57	167
22	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10	14	14	2	0
23	Korban Tindak Kekerasan	12	3	3	0	0
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2,659	1,912	1,912	0	0

NO	KATEGORI PMKS	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
25	Fakir Miskin	44,315	181,214	205,593	158,485	193,008
	Fakir Miskin (DTKS)	44,315	181,214	162,754	123,627	193,008
	pbi apbn bdt		81,192	84,129	123,627	140,655
	Bpnt	20,467	15,037	13,784	16,227	16,227
	Pkh	6,943	14,654	13,968	12,558	10,967
	kube produksi	N/A	300	300	90	300
	kube jasa (c-warong)	N/A	290	290	290	290
	BST	N/A	N/A	N/A	N/A	24,109
	PBI APBD DTKS (Rekomendasi DTKS dari Dinsos ke Dinkes)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,580
	Fakir miskin non bdt (pbi)	N/A	67,182	0	34,858	26,664
	Fakirmiskin Jamkesda	N/A	37,584	0	N/A	N/A
	Fakir Miskin APBD (Integrasi)	N/A	42,839	42,839	N/A	N/A
26	Komunitas Adat Terpencil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah		78,194	328,819	209,848	158,894	194,572

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

- Renstra K/L

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial merupakan salah satu kementerian/lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pada periode 2015-2019 program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Hal ini didukung dengan terselenggaranya program afirmatif yang langsung menargetkan penduduk miskin dan rentan sebagai sasaran utama. Program tersebut diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH),

program sembako, dan program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.

Kementerian Sosial tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait hal tersebut, salah satu persoalan yang dihadapi saat ini adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang masih rendah. Peran Kementerian Sosial berikutnya diarahkan pada pelaksanaan peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiksinan ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat Indonesia.

Pada periode tahun 2020-2024 pembangunan/ penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Oleh sebab itu, pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk penyandang disabilitas, anak, dan lansia. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, Kementerian Sosial saat ini memiliki potensi untuk berkontribusi lebih banyak dalam pencapaian target pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS meliputi 1) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk di dalamnya data lembaga di bidang kesejahteraan sosial seperti LKS, panti dan balai kesejahteraan sosial. DTKS digunakan sebagai sumber data utama

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/atau masyarakat. Basis data ini berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% (empat puluh persen) penduduk di Indonesia yang paling rendah status kesejahteraannya. Rumah tangga yang ada dalam DTKS dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya. Data ini bertujuan sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Intervensi yang diberikan berdasarkan kondisi yang dialami oleh setiap penduduk seperti kemiskinan, keterlantaran, kondisi disabilitas, keadaan terpencil, kondisi tuna sosial, korban bencana, atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Untuk mendukung target zero poverty perlu dilakukan reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020-2024. Langkah awal yang akan dilakukan yaitu inventarisasi data dan sistem pendataan program lintas K/L dengan melibatkan TKPKD dalam proses pengelolaan data penduduk miskin, perbaikan skema community based targetting, dan memanfaatkan pusat layanan terpadu untuk pendataan penduduk. Selanjutnya DTKS dapat dipergunakan sebagai basis data penyaluran bantuan sosial dan subsidi Pemerintah Pusat dan Daerah. Integrasi layanan dan pendataan akan melibatkan pemerintah desa secara aktif dengan mempertimbangkan faktor pendukung diantaranya ketersediaan dana desa untuk pembiayaan pemutakhiran data, peningkatan kompetensi dan sertifikasi pendamping, serta kerjasama lintas sektor di pusat dan daerah. Data yang akurat dan mutakhir dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, akan menjamin program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dimana Data Terpadu harus diverifikasi dan divalidasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali. Demikian pula untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dimana Verifikasi dan Validasi dilakukan setiap saat dengan penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan sekali. Mengingat perubahan kondisi penerima manfaat bersifat dinamis yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografis penduduk, perubahan status sosial ekonomi, mobilitas penduduk maka Kementerian Sosial perlu melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala. Agar pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, terintegrasi, dan termonitor dengan baik, Kementerian Sosial saat ini telah mengembangkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKSNG). Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS maka cakupan kegiatan verifikasi dan validasi secara berkala sebaiknya di tingkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan verifikasi dan validasi DTKS oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pendataan penduduk miskin dan rentan. Melalui kegiatan verifikasi dan validasi DTKS dengan SIKS-NG, kesalahan karena inclusion error (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat/ ineligible sebagai penerima manfaat) dan exclusion error (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat) dapat diminimalisasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/2020 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020, saat ini terdapat 27.060.751 rumah tangga, 29.085.939 keluarga, 97.388.064 jiwa dengan kategori anggota rumah tangga serta 630.638 di luar rumah tangga. Sedangkan untuk data terpadu kesejahteraan sosial berbasis Komunitas Adat Terpencil sebanyak 1.534 rumah tangga, 1.535 keluarga, dan 6.234 jiwa anggota rumah tangga.

Dalam pembagian kewenangan pemerintahan, bidang sosial menjadi salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada SPM Bidang Sosial memiliki peran penting untuk mendorong pelaksanaan program kesejahteraan sosial yang terstandarisasi di berbagai tingkat dan lokasi. Koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah seringkali menemui tantangan seperti sifat organisasi yang cenderung eksklusif, ego sektoral instansi yang menyulitkan koordinasi, serta keterbatasan anggaran. Permasalahan lainnya adalah lemahnya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu di tingkat 33 kabupaten/kota/kecamatan/desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan pendataan penduduk. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, akurasi, dan validitas data sasaran peserta atau penerima manfaat program menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah telah merintis upaya pembangunan sebuah pusat data untuk sasaran program penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki DTKS. Basis data ini memuat data detail rumah tangga miskin dan kurang mampu di Indonesia yang mencakup data karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu: : ''Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut: 1.

misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia 2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan 3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 4. misi nomor 9 : sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Tabel 3.3
Tujuan Strategis Kementerian Sosial 2020-2024

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
T1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraa Sosial
T2	Meningkatnya layanan yang berkualitas oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1. Indeks partisipasi sosial 2. Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi(ASN non ASN) 3. Persentasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi 4. Persentasi Daerah yang Menyelenggarana Layanan Terpadu Penangulangan Kemisikinan
		5. Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyelengaraan Program Penanggulangan Kemiskinan
T3	Mewujudkan penguatan Tata Kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan pelinatan public	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Sumber : Renstra Kementerian Sosial 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial tahun 2020-2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Sosial pada periode bersangkutan.

Kebijakan dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

- **Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau**

Tujuan pembangunan Provinsi Riau selama 5 (lima) tahun kedepan adalalah "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia", yang dijabarkan ke dalam lima (Lima) misi yaitu:

1. Misi 1 :

   Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.

2. Misi 2 :

   Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3. Misi 3 :

   Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

4. Misi 4 :

   Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.

5. Misi 5 :

   Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang prima berbasis teknologi informasi.

Sebagaimana visi dan misi di atas, maka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan mendukung pencapaian misi Gubernur yaitu **misi ketiga yaitu guna Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.** Misi tersebut dijabarkan dalam suatu tujuan pembangunan Provinsi Riau yaitu Mewujudkan

perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian ekonomi
2. Meningkatnya investasi daerah
3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
4. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Tujuan Dinas Sosial Provinsi Riau mengacu pada sasaran ke empat pada misi ketiga ini, yaitu menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Riau dilaksanakan melalui suatu strategi peningkatan pelayanan terhadap PPKS dan peningkatan peran dari PSKS. Strategi ini dilaksanakan melalui kebijakan berupa perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial.

Sejalan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi tersebut diatas pula Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menyusun program kerja dengan beberapa program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2023-2026.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai/Panti/Pusat Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks Psikotik, Bina Laras, anak terlantar, Tuna Sosial, penyandang disabilitas, lanjut usia dan Anak Nakal serta pola-pola

penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana serta shelter bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan subtantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PPKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

Sejalan dengan itu pula Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah menyusun program kerja dengan beberapa program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah daerah provinsi dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam RENSTRA Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2023-2026.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Kota Pekanbaru merupakan ibukota provinsi yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten berbagai macam aspek menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru yang majemuk. Penduduk yang menetap di Kota Pekanbaru tidak hanya suku bangsa melayu, namun

juga banyak dari suku minang, jawa, keturunan cina,. Permasalahan sosial yang muncul pun beraneka ragam.

Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah pembangunan kesejahteraan sosial. Program dan kegiatan yang dicanangkan dalam OPD Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengacu pada tujuan 1 yaitu **"Meningkatnya kualitas SDM"** melalui pembangunan manusia seutuhnya dengan salah satu sasarannya adalah **"meningkatnya standar hidup layak"**.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pembangunan bidang sosial di Kota Pekanbaru. Pembangunan ini terlihat dari pemberian pelayanan bagi PPKS dalam bentuk bantuan dan selanjutnya peningkatan keahlian PPKS agar dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga PPKS dapat bertumbuh menjadi individu yang potensial.

Pemberdayaan PSKS pun adalah faktor penting dalam pembangunan sosial berkelanjutan di Kota Pekanbaru . Dengan adanya Tenaga penyuluh, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang taruna, keluarga pioneer, dan lainnya diharapkan menjadi potensi yang akan mengembangkan dan menggerakkan pembangunan sosial sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan di tengah tengah masyarakat Kota Pekanbaru.

Berbagai isu muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

a. Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

b. Penguatan pelaksanan Verifikasi, Validasi, Pengelolaan data dan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penanganan kemiskinan di Kota Pekanbaru.
c. Banyaknya PPKS yang telah mengganggu ketertiban umum serta kenyamanan dan keindahan kota.
d. Rehabilitasi sosial melalui penyediaan aksesbilitas penyandang disabilitas, eks psikotik dan eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
e. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
f. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PPKS.
g. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, dan perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
h. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PPKS.
i. Peningkatan peran aktif masyarakat dan pihak berwenang lainnya dalam pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan serta kesetiakawanan sosial.
j. Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PPKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan sustainable.
k. Didalam dokumen **RPD** Kota Pekanbaru isu strategis yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah **kemiskinan dan ketimpangan**.

B A B IV
TUJUAN DAN SASARAN

Meneruskan Sasaran dari RPD Kota Pekanbaru Dinas Sosial sebagai salah satu pengampu sasaran RPD dengan tujuan meningkatnya standar hidup layak menjadikan tujuan OPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan sasaran yaitu Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat .

Dengan Indikator sasaran Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial dan Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Uraian diatas bisa di lihat pada tabel 4.1 dibawah:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2023 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Baseline (2021)	Target			
					2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Standar Hidup Layak	Pengeluaran per Kapita	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial	73.06	73.36	73.66	73.86	74
		Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	81.43	83	84	85	86
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Kota Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Dinas Sosial	82.81	83	83.25	83.5	84
	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru							

Tabel 4. 2
Formula Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2023-2026

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN / KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kebutuhan dasar PPKS Melalui Rehabilitasi , Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan sosial	%	74	Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun)/Jumlah PMKS (dalam 1 tahun) *100	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Pembilang : Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PMKS (dalam 1 tahun)
2	Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.	%	86	Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun)/Jumlah PSKS (dalam 1 tahun)*100	Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Pembilang : Jumlah PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. (dalam 1 tahun) Penyebut : Jumlah PSKS (dalam 1 tahun)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Tabel T-C 26a
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RPD Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Stategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS

Tabel T-C 26b
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Stategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Standar Hidup Layak	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui rehabilitasi sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Optimalisasi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Pemenuhan Kebutuhan dasar PPKS
			Optimalisasi sistem pelayanan dan penanganan PPKS
			Mendorong upaya Verifikasi dan Validasi Data
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan penanganan PPKS
			Membangun Koordinasi dalam Upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat	Optimalisasi upaya pemberdayaan sosial bagi PSKS	Pendampingan dan Pemberdayaan
			Pemberian Bantuan stimulan dan penataan lingkungan
			Peningkatan pemberdayaan Perorangan, keluarga yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Peningkatan pemberdayaan

			masyarakat, kelembagaan sosial dan lembaga lainnya yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terintegrasi (SLRT)
			Peningkatan Pengawasan Penyelenggra Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB) yang berkualitas
			Peningkatan peran aktif masyarakat dan pihak berwenang lainnya dalam pelestarian nilai kepahlawanan dan keperintisan
			Peningkatan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan AKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program pembangunan kesejahteraan sosial akan terus berlanjut sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pekanbaru, yaitu:

a. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

a.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

a.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

a.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

a.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

a.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

a.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

a.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

a.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

a.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

a.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a.4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

a.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

a.4.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

a.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.5.1. Pengadaan Mebel

a.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

a.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

a.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

b.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

b.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

b.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

b.2.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

b.2.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

b.2.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

b.2.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

b.2.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

c. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

c.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

c.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

d. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

d.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

d.1.1. Penyediaan Permakanan

d.1.2. Penyediaan Sandang

d.1.3. Penyediaan Alat Bantu

d.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

d.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

d.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

d.1.7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

d.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

d.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

d.1.10. Pemberian Layanan Kedaruratan

d.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

d.1.12. Pemberian Layanan Rujukan

d.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

d.2.1. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

d.2.2. Pemberian Layanan Kedaruratan

d.2.3. Penyediaan Permakanan

d.2.4. Penyediaan Sandang

d.2.5. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

d.2.6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

e. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

e.1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

e.1.1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

e.1.2. Rujukan Anak-Anak Terlantar

e.1.3. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

e.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

e.2.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

e.2.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

e.2.3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

e.2.4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

f. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

f.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

f.1.1. Penyediaan Makanan

f.1.2. Penyediaan Sandang

f.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

f.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

f.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial

f.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

f.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

f.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

g. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

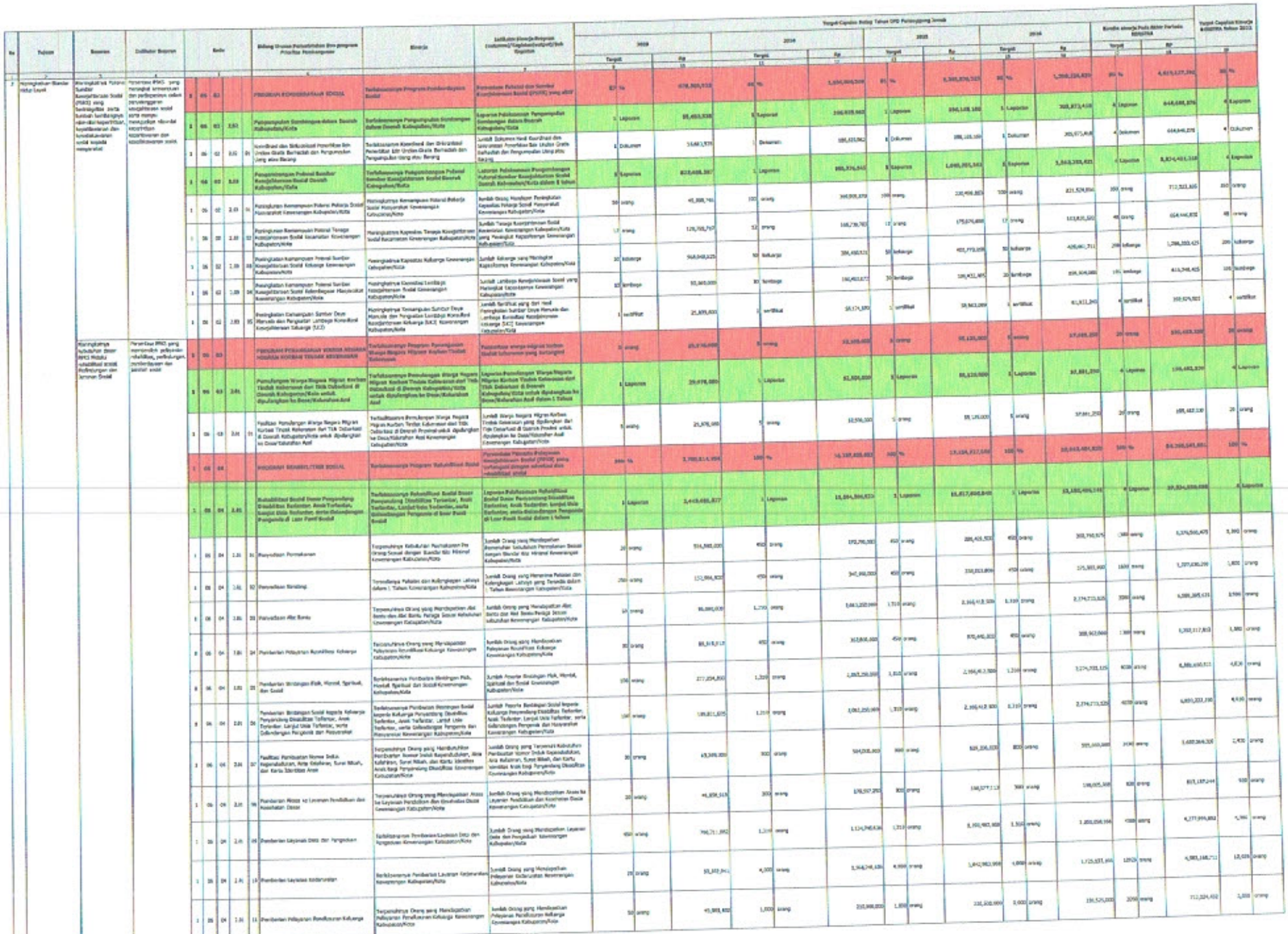
g.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

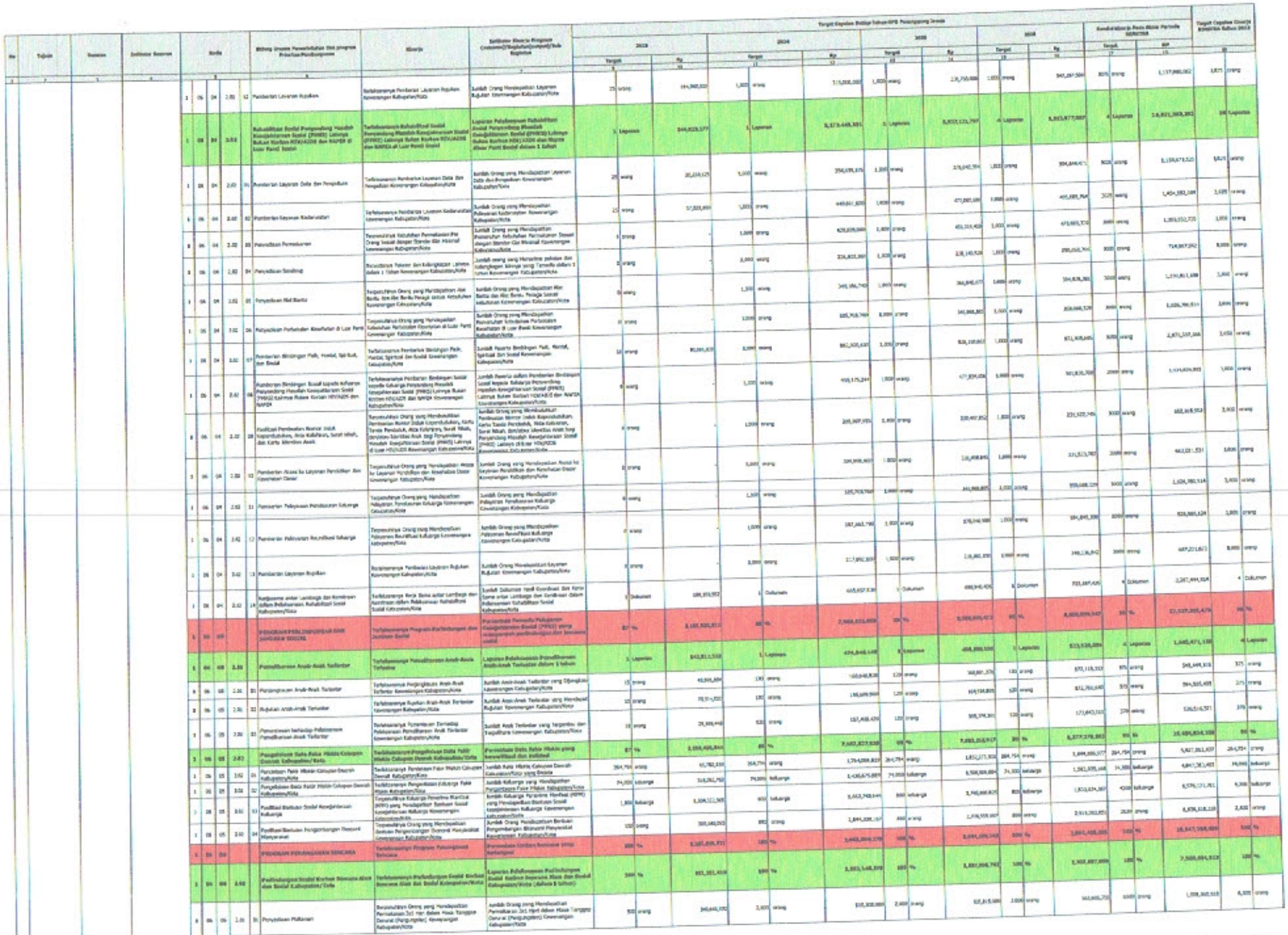
g.1.1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

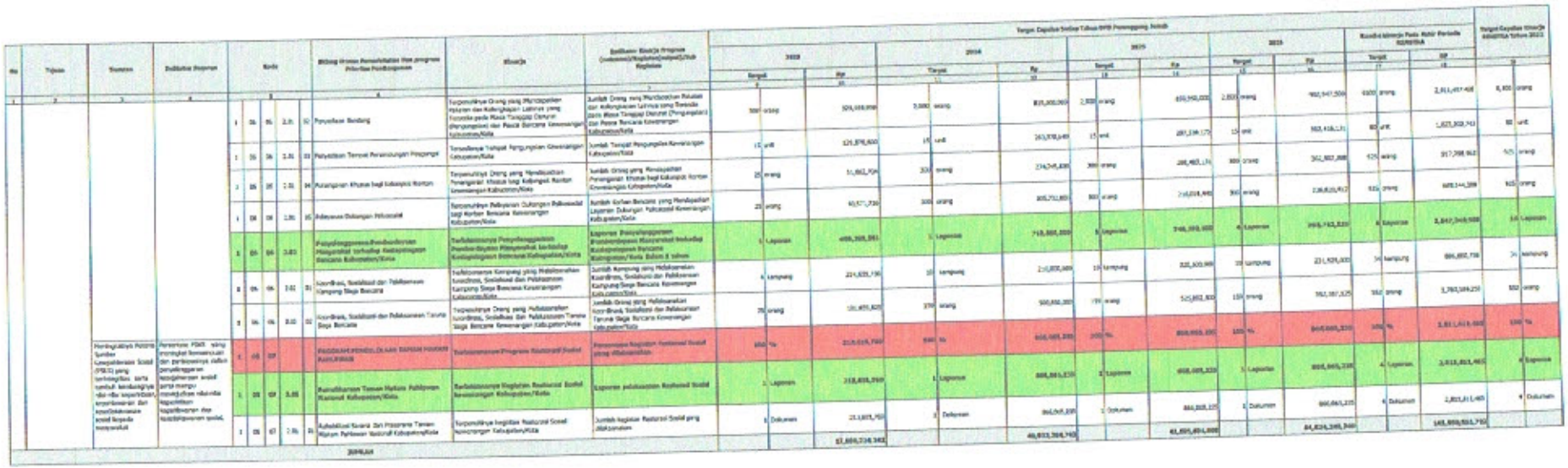
Secara rinci tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dapat dilihat pada Tabel 6. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru dibawah ini:

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Bidang Urusan Pemerintahan Dan program Prioritas Pembangunan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Setiap Tahun dan Kondisi Penutup Tahun										Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018
											2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Dinsos Sosial	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terfasilitasinya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Kelembagaan yang terfasilitasi dengan baik	100	%	18,304,541,083	100	%	18,901,886,000	100	%	22,647,644,678	100	%	23,497,104,304	100	%	46,604,835,677	100	%
1	2	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	93,676,440	4	Laporan	98,826,000	4	Laporan	49,676,540	4	Laporan	38,898,504	4	Laporan	327,101,948	4	Laporan
1	2	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berkualitasnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	21,822,900	2	Dokumen	22,914,000	2	Dokumen	23,560,000	2	Dokumen	31,806,000	2	Dokumen	99,298,000	8	Dokumen
1	2	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	8,370,900	4	Laporan	14,676,900	4	Laporan	14,676,900	4	Laporan	14,676,900	16	Laporan	52,381,700	16	Laporan
1	2	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	5,599,540	1	Laporan	12,006,000	1	Laporan	12,006,000	1	Laporan	12,000,000	4	Laporan	41,599,540	4	Laporan
1	2	06	02	2.02		Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	5	Laporan	6,931,975,283	5	Laporan	6,499,308,440	5	Laporan	6,499,308,440	5	Laporan	6,499,308,440	20	Laporan	26,930,823,603	20	Laporan
1	2	06	02	2.02	01	Penyusunan Sipd dan Tunjangan Aki	Terselesaikan Sipd dan Tunjangan Aki	Jumlah Orang yang Menerima Sipd dan Tunjangan Aki	35	Orang/Bulan	8,316,371,583	35	Orang/Bulan	8,365,867,140	35	Orang/Bulan	8,365,867,140	35	Orang/Bulan	8,365,867,140	140	Orang/Bulan	33,414,967,003	140	Orang/Bulan
1	2	06	02	2.02	05	Koordinasi dan Pelaporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselesaikan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengesahan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengesahan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	Laporan	9,325,750	4	Laporan	14,725,750	4	Laporan	14,725,750	4	Laporan	14,725,750	16	Laporan	53,503,000	16	Laporan
1	2	06	02	2.02	07	Koordinasi dan Pelaporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselesaikan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan-Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	5,604,450	1	Laporan	8,564,450	1	Laporan	8,564,450	1	Laporan	8,564,450	4	Laporan	31,857,800	4	Laporan
1	2	06	03	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Laporan	886,568,800	1	Laporan	887,886,000	1	Laporan	893,886,000	1	Laporan	893,886,000	4	Laporan	3,896,662,800	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	73,861,000	2	paket	192,800,000	2	paket	193,800,000	2	paket	193,800,000	8	paket	521,300,000	8	paket
1	2	06	03	2.03	04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	orang	55,000,000	15	orang	250,000,000	15	orang	250,000,000	15	orang	250,000,000	60	orang	805,000,000	60	orang
1	2	06	03	2.03	13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	orang	-	5	orang	97,680,000	5	orang	50,000,000	5	orang	50,000,000	#VALUE!	orang	197,680,000	#VALUE!	orang
1	2	06	03	2.03	15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasinya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	orang	78,462,000	5	orang	140,000,000	5	orang	150,000,000	5	orang	150,000,000	20	orang	578,462,000	20	orang
1	2	06	03	2.03		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Laporan	1,448,696,936	1	Laporan	1,551,966,440	1	Laporan	2,304,661,838	1	Laporan	2,467,548,476	4	Laporan	8,772,873,690	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	01	Pelayanan Kebersihan/Cleaning Service Gedung Kantor	Terwujudnya Kebersihan Lingkungan Kantor yang Terciptakan	Jumlah Paket Kebersihan Lingkungan Kantor yang Terciptakan	1	paket	74,719,200	1	paket	49,551,012	1	paket	49,551,012	1	paket	49,551,012	4	paket	223,372,236	4	paket
1	2	06	03	2.03	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	paket	-	1	paket	150,000,000	1	paket	150,000,000	1	paket	150,000,000	#VALUE!	paket	450,000,000	#VALUE!	paket
1	2	06	03	2.03	04	Pelayanan Bahan/Logistik Kantor	Terwujudnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	636,111,320	1	paket	688,675,100	1	paket	757,485,610	1	paket	833,233,971	4	paket	2,915,361,401	4	paket
1	2	06	03	2.03	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pasa Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	299,361,345	1	paket	329,297,847	1	paket	362,251,994	1	paket	398,478,261	4	paket	1,389,419,448	4	paket
1	2	06	03	2.03	06	Pelayanan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	31,800,000	1	Dokumen	32,880,000	1	Dokumen	11,568,000	1	Dokumen	34,324,800	4	Dokumen	51,921,800	4	Dokumen
1	2	06	03	2.03	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58	Laporan	591,434,511	58	Laporan	801,734,832	58	Laporan	801,734,832	58	Laporan	801,734,832	232	Laporan	2,996,819,248	232	Laporan
1	2	06	03	2.03	11	Perjalanan Dinas Biasa Pimpinan dan Anggota DPRD	Terfasilitasinya Perjalanan Dinas Biasa Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Dokumen	88,458,000	2	Dokumen	150,000,000	2	Dokumen	150,000,000	2	Dokumen	150,000,000	8	Dokumen	538,458,000	8	Dokumen
1	2	06	03	2.03	13	Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pelayanan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	-	Dokumen	-	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000	1	Dokumen	50,000,000	#VALUE!	Dokumen	150,000,000	#VALUE!	Dokumen
1	2	06	03	2.03		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Laporan	875,108,842	1	Laporan	8,881,586,860	1	Laporan	1,696,888,860	1	Laporan	8,888,765,876	4	Laporan	6,432,387,822	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	unit	-	3	unit	354,750,000	3	unit	434,288,000	2	unit	477,716,800	5	unit	1,266,754,800	5	unit
1	2	06	03	2.03	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terwujudnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	174,375,000	3	unit	594,760,000	3	unit	454,800,000	3	unit	458,988,000	11	unit	1,782,863,000	11	unit
1	2	06	03	2.03	03	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	paket	95,200,000	5	paket	832,775,000	5	paket	333,052,500	5	paket	366,357,750	20	paket	1,627,435,250	20	paket
1	2	06	03	2.03	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	unit	418,570,800	50	unit	698,875,500	50	unit	698,875,500	50	unit	734,811,450	175	unit	2,418,133,250	175	unit
1	2	06	03	2.03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Laporan	206,823,880	1	Laporan	803,814,251	1	Laporan	724,998,302	1	Laporan	795,842,866	4	Laporan	2,774,889,299	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	-	1	Laporan	3,879,000	1	Laporan	3,879,000	1	Laporan	3,879,000	3	Laporan	8,274,000	7	Laporan
1	2	06	03	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Laporan	397,759,800	1	Laporan	282,908,880	1	Laporan	420,766,476	1	Laporan	462,858,480	4	Laporan	1,564,293,636	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	32,308,120	1	Laporan	27,276,147	1	Laporan	41,203,758	1	Laporan	45,324,133	4	Laporan	146,112,158	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	214,972,830	1	Laporan	336,629,202	1	Laporan	203,160,180	1	Laporan	223,476,198	4	Laporan	978,238,410	4	Laporan
1	2	06	03	2.03		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	694,455,398	1	Laporan	938,588,738	1	Laporan	1,811,110,998	1	Laporan	2,111,331,478	4	Laporan	5,685,886,612	4	Laporan
1	2	06	03	2.03	01	Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayakan Pajaknya	27	unit	580,615,920	27	unit	690,576,720	27	unit	764,834,208	27	unit	836,817,696	108	unit	3,483,044,544	108	unit
1	2	06	03	2.03	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terfasilitasinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	48,840,000	1	unit	227,804,400	1	unit	250,676,436	1	unit	275,744,080	4	unit	793,044,916	4	unit







B A B VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Organisasi Dinas Sosial yang menjadi dan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam kurun waktu RENSTRA Tahun 2023 - 2026, secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel 7.1. dan tabel 7.2. di bawah ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menjadi tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPD
			Tahun Ke-0	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
1	Pengeluaran Per Kapita	%	n/a	3,05	2,85	2,84	2,83	2,8	2,8

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Target Akhir RPD
			Tahun Ke-0	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	
1	Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan sosial	%	73,06	73,36	73,66	73,86	74	74
2	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaran kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	%	81,43	83	84	85	86	86

BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategi (Renstra) yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberikan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan serta Kebijakan dan Program Pembangunan serta Rencana Kerja selama 4 (empat) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini mengacu kepada RPD Kota Pekanbaru Tahun 2023 - 2026 yang didalamnya memuat Strategi, Kebijakan dan Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), RKA yang disusun setiap tahun selama periode 4 (empat) tahun.

Untuk mencapai tujuan Renstra ini perlu dibangun komitmen dan kesepakatan dari semua Stakeholder dan mendapatkan dukungan yang optimal dalam tahapan implementasinya. Untuk tercapainya kondisi yang diharapkan pada akhir Tahun 2026, maka peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Pekanbaru, 2022
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dr. H. IDRUS, S.Ag., M.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19730215 199803 1 003

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Standar Hidup Layak				Pengeluaran per Kapita	14360000 Rupiah	14514170 Rupiah		14742937 Rupiah		14992839 Rupiah		15303885 Rupiah		0 Rupiah		15303885 Rupiah			
	Meningkatnya kebutuhan dasar PPKS Melalui Rehabilitasi , Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial			Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan sosial	20.35 %	20.85 %		20.82 %		20.91 %		21 %		0 %		21 %			
		1.06.03	PROGRAM PENANGANAN KEWARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah warga migran yang dilakukan penanganan	0orang	5 orang	29,976,080	5 orang	52,500,000	5 orang	55,125,000	5 orang	57,881,250	0orang	0	5 orang	0		
		1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dalam 1 tahun	0 Laporan	1 Laporan	29,976,080	1 Laporan	52,500,000	1 Laporan	55,125,000	1 Laporan	57,881,250	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	0 %	100 %	2,790,514,854	100 %	16,337,835,858	100 %	17,154,727,646	100 %	18,012,464,028	0 %	0	100 %	0		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dalam 1 tahun	0 Laporan	1 Laporan	2,443,681,007	1 Laporan	11,064,886,522	1 Laporan	11,617,606,848	1 Laporan	12,198,486,141	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial dalam 1 tahun	0 Laporan	1 Laporan	346,833,273	1 Laporan	5,273,449,331	1 Laporan	5,537,121,797	1 Laporan	5,813,977,887	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0 %	87 %	2,141,930,372	88 %	3,982,675,688	89 %	8,381,809,493	90 %	8,800,899,967	0 %	0	90 %	0		
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Telantar	Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-Anak Telantar dalam 1 tahun	0 Laporan	1 Laporan	343,512,332	1 Laporan	414,848,149	1 Laporan	498,990,558	1 Laporan	523,525,086	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan Validasi	0 %	87 %	2,018,408,040	88 %	7,567,827,539	89 %	7,883,218,987	90 %	8,297,379,863	0 %	0	90 %	0	Dinas Sosial	
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana	0 persen	100 persen	1,927,646,721	100 persen	2,803,999,279	100 persen	2,944,199,243	100 persen	3,091,409,205	0 persen	0	100 persen	0		
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota (Dalam 1 tahun)	0 %	100 %	909,351,410	100 %	2,038,149,279	100 %	2,192,806,743	100 %	2,302,447,080	0 %	0	100 %	0	Dinas Sosial	
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	0 Laporan	1 Laporan	406,295,961	1 Laporan	765,850,800	1 Laporan	246,392,500	1 Laporan	783,712,125	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kota Pekanbaru

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berintegritas serta tumbuh kembangnya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat			**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu menjadikan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial**	**88.45 %**	**83 %**		**84 %**		**85 %**		**86 %**		**0 %**		**86 %**			
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	0 %	83 %	876,369,902	84 %	1,186,600,308	85 %	1,245,930,323	86 %	1,308,226,839	0 %	0	86 %	0		
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	55,088,535	1 Laporan	186,823,962	1 Laporan	196,165,160	1 Laporan	206,973,418	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		1.06.02.2.05	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	0 Laporan	1 Laporan	822,686,387	1 Laporan	999,776,945	1 Laporan	1,549,765,153	1 Laporan	1,152,253,421	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase kegiatan Restorasi Sosial yang dilaksanakan	0 %	100 %	213,615,760	100 %	866,065,235	100 %	866,065,235	100 %	866,065,235	0 %	0	100 %	0		
		1.06.27.2.05	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Restorasi Sosial	0 Laporan	1 Laporan	213,615,760	1 Laporan	866,065,235	1 Laporan	866,065,235	1 Laporan	866,065,235	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				**Nilai IKM Kota Pekanbaru** **Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Pekanbaru**	**83,8 Nilai** **2,17 (Cukup) Nilai**	**85,58 Nilai** **2,7 (Baik) Nilai**		**86,55 Nilai** **3 (Baik) Nilai**		**87,52 Nilai** **3,3 (Baik) Nilai**		**88,49 Nilai** **3,5 (Sangat Baik) Nilai**		**0 Nilai** **0 Nilai**		**88,49 Nilai** **3,5 (Sangat Baik) Nilai**			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			**Nilai IKM Dinas Sosial**	**82,61 Nilai**	**83 Nilai**		**83,25 Nilai**		**83,5 Nilai**		**84 Nilai**		**0 Nilai**		**84 Nilai**			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani dengan baik	0 %	100 %	10,316,181,083	100 %	11,702,608,100	100 %	12,047,964,978	100 %	12,487,294,236	0 %	0	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	31,070,445	1 Laporan	49,070,500	1 Laporan	48,070,500	1 Laporan	58,070,500	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	6,381,571,280	1 Laporan	5,409,358,440	1 Laporan	5,409,358,440	1 Laporan	5,800,350,440	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	198,252,000	1 Laporan	602,800,000	1 Laporan	602,800,000	1 Laporan	622,809,000	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	1,849,079,326	1 Laporan	2,251,980,440	1 Laporan	2,354,052,887	1 Laporan	2,867,343,475	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Laporan	1 Laporan	875,102,443	1 Laporan	1,811,290,065	1 Laporan	1,896,062,069	1 Laporan	2,699,765,075	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	1 Laporan	594,639,980	1 Laporan	868,986,211	1 Laporan	924,508,382	1 Laporan	296,642,866	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Laporan	1 Laporan	635,455,206	1 Laporan	920,180,727	1 Laporan	1,012,110,299	1 Laporan	1,113,321,879	0 Laporan	0	4 Laporan	0	Dinas Sosial	